



**Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim:
Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring**

Oleh:

Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani¹

Abstraksi

Narasi bergerak mengenai Islam dimungkinkan karena media moderen mempengaruhi lanskap budaya dan politik kehidupan kaum Muslim sehari-harinya. Kasus 'Aksi Bela Islam' pada tahun 2016 menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, atau yang biasa dikenal dengan nama Ahok, dipenjara karena dianggap telah menista Islam. Kasus ini menunjukkan bahwa para penyelenggara aksi telah berhasil memobilisasi dukungan massa melalui kampanye di media sosial. Kajian ini melacak bagaimana strategi melalui mediatisasi dakwah (propaganda yang mengatasnamakan Islam) dilakukan dalam Aksi Bela Islam dengan mengeksplorasi representasi *online* 'daring' (dalam jaringan) di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi pesan personal WhatsApp, sehingga menunjukkan suatu lokasi pada ruang yang disebut sebagai 'Publik Muslim'. Kemampuan media sosial untuk memungkinkan komunikasi interaktif secara khusus menempatkan 'narasi bergerak' tentang keshalehan kaum Muslim urban di Indonesia. Studi etnografi juga dilakukan untuk melihat bagaimana komunitas *offline* - luring (luar jaringan) yang memiliki akses internet terbatas mendukung gagasan 'membela Islam' di Indonesia. Dengan mengkaji baik representasi 'daring' maupun observasi komunitas 'luring', kajian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk mengkonstruksi strategi dakwah dan politik moralitas publik yang mengutamakan kode-kode dan etika keshalehan dalam Islam di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Ruang publik Muslim, Aksi Bela Islam, narasi bergerak Islam, representasi daring, komunitas luring, moralitas publik.

Abstract

Shifting narratives about Islam are made possible because modern media affect the cultural and political landscape of Muslims' everyday lives. The 2016 case of 'Aksi Bela Islam' (the Action to Defend Islam), which demanded that Jakarta Governor Basuki Cahaya Purnama, or Ahok, be jailed for blasphemy, demonstrates the ability of the rally organizers to mobilize mass support through social media campaigns. The study traces the mediatization of da'wa (Islamic propagation) strategies by exploring the online representations of the Action to Defend Islam found in social media such as Facebook, Instagram, and personal instant messenger of WhatsApp, each of which can be seen as part of the Muslim public sphere. The ability of social media to conduct interactive communication particularizes shifting narratives of Islamic piety among urban Muslims in Indonesia. The ethnography study also concerns on the offline community - those who have limited online access - whose members likewise support the idea of defending Islam in Indonesia. By conducting online and offline observations of the Muslim public sphere, the study aims at analyzing social media practices which construct da'wa strategies and the politics of public morality, both underlie the ethics and moral codes of Islamic piety in Indonesia today.

Keywords: Muslim public sphere, the Action to defend Islam, shifting narratives on Islam, online representation, offline community, public morality.

¹ Arie Setyaningrum Pamungkas adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi UGM. Melakukan penelitian tentang Aksi Bela Islam di Media Sosial dan Komunitas-Komunitas Pendukung Aksi Bela Islam di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sejak November 2016.

Gita Octaviani, adalah mahasiswa pada program studi Sarjana di Departemen Sosiologi dan menulis skripsi mengenai 'Representasi Media Sosial Aksi Bela Islam'. Saat ini ia sedang mempersiapkan ujian akhir untuk lulus sebagai Sarjana Sosial di Departemen Sosiologi UGM.

A. Latar Belakang

Aksi bela Islam III, yang dikenal sebagai Aksi 212 dalam liputan di banyak media (baik media mainstream yang sekuler maupun media-media komunitas di kalangan kaum Muslim yang beragam) diapresiasi sebagai aksi damai. Hal itu dikarenakan aksi tersebut ditunjukkan melalui suatu mobilisasi massa yang demikian besar dalam bentuk ibadah shalat Jum'at di lapangan Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016. Hal yang membedakannya dengan aksi sebelumnya di Aksi Bela Islam I dan bahkan II pada 4 November 2016 yang berakhir dengan unjuk rasa dan kerusuhan di beberapa lokasi di DKI Jakarta. Sebelumnya, pada tanggal 4 November 2016 sejumlah ormas Islam yang didukung oleh beberapa organisasi mahasiswa Islam melakukan demonstrasi besar yang berakhir dengan kerusuhan untuk menuntut Ahok atau Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah melakukan penghinaan terhadap kaum Muslim karena pernyataannya di hadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu pada bulan September 2016 dengan mengutip ayat dari Al Qur'an yaitu Surah Al Maidah ayat 51. Polemik tentang penistaan agama inilah yang menjadi momentum awal bagaimana mobilisasi massa dilakukan oleh GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia) sebagai penyelenggara aksi tersebut. GNPf-MUI sebagai 'organizer' utama Aksi Bela Islam mengklaim

mobilisasi massa itu dibenarkan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait pernyataan Ahok tersebut sebagai suatu pernyataan yang menistakan Al Quran dan ulama dan karena disampaikan di muka umum, maka pernyataan tersebut dianggap memiliki konsekuensi hukum.²



Gambar. 01. Postingan video Buni Yani di laman dinding Facecooknya, pada tanggal 6 Oktober 2016, bertajuk 'Penistaan terhadap Agama?' (Sumber: dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas)³

² Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadiri oleh 70 orang utusan ormas-ormas Islam dan 29 orang ulama pada tanggal 9 November 2016 mengeluarkan putusan fatwa penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sumber berita online Rimanews di laman <http://rimanews.com/nasional/hukum/read/20161109/307850/MUI-Perkuat-Fatwa-Penistaan-Agama-Ahok/>. Diakses pada 1 Desember 2016.

³ Facebook, Akun Buni Yani <https://www.facebook.com/buniyani/> Diakses pada 25 Oktober 2016 pk. 20:08 WIB.

Kasus ini mulai 'meledak' dan menjadi perhatian publik luas baik di level nasional, bahkan internasional, sejak adanya polemik 'penistaan agama' yang mulai muncul melalui postingan video Ahok yang berkunjung ke Kepulauan Seribu dengan tajuk "Penistaan terhadap Agama?" yang diunggah oleh Buni Yani pada 6 Oktober 2016 melalui akun Facebooknya. Penggalan perkataan Ahok yang menyebutkan "jangan mau dibohongi pakai Ayat Al Maidah 51" itulah yang kemudian digiring menjadi polemik publik, apalagi ketika itu di akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017 situasi di DKI Jakarta sedang dalam keadaan 'panas' khususnya pada masa kampanye sebelum berlangsungnya Pilkada DKI 2017 pada putaran pertama 15 Februari 2017, dan terus berlanjut sebelum putaran kedua Pilkada DKI pada 19 April 2017. Kasus Ahok tersebut menimbulkan polemik dan bahkan kegaduhan politik menjelang dilaksanakannya Pilkada DKI Jakarta pada awal 2017 dimana Ahok juga ikut mencalonkan diri sebagai Petahana. Pada akhirnya polemik itu berujung pada peradilan atas penistaan agama dan diputuskannya Ahok terbukti bersalah melakukan penistaan agama dengan vonis hukuman selama 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2017.⁴ Wacana dominan yang disebarluaskan khususnya oleh GNPF-MUI ke khalayak ramai khususnya pada publik kaum Muslim di Indonesia adalah pendapat bahwa Ahok sebagai seorang non-Muslim dengan sengaja menggunakan pernyataan itu dengan tujuan untuk menyatakan bahwa "Ayat Al

Maidah 51 digunakan untuk membohongi umat Muslim agar tidak memilih pemimpin kafir." Hal itu memunculkan dua polemik utama yang diwacanakan GNPF-MUI khususnya melalui media sosial yakni;

(1) Tafsir GNPF-MUI bahwa Ahok telah menghina ulama (pemimpin kaum Muslim) karena kalimatnya itu mengindikasikan pesan seorang ulama itu adalah "orang yang suka berbohong (penipu)."

(2) Tafsir GNPF-MUI bahwa Ahok telah menista Al-Qur'an khususnya aAl Maidah Ayat 51, dengan mengindikasikan bahwa ulama yang menggunakan ayat itu, ditujukan untuk kepentingan 'menipu' umat dan atau ayat itu telah 'menipu' umat kaum Muslim pada umumnya, padahal ayat itu secara 'teks' adalah teks suci yang merupakan wahyu Allah SWT yang secara mutlak termaktub sebagai 'kitab Allah' dan karenanya tidak bisa dikutip 'sembarangan' atau dijadikan alasan argumentasi khususnya oleh seorang non-Muslim (kafir). Jadi Ahok dianggap telah menistakan Al-Qur'an.

Kedua interpretasi atas 'penggalan kalimat yang dinyatakan oleh Ahok' di dalam video Buni Yani itulah yang paling dominan diwacanakan oleh para penggerak Aksi Bela Islam khususnya GNPF-MUI melalui media sosial yang kemudian tersebar luas secara massif melalui jejaring komunitas khususnya melalui teknologi '*mobile*' *smartphone* melalui aplikasi pesan personal WhatsApp hingga menjangkau ke ruang privat banyak Muslim di seluruh Indonesia.

⁴ Sumber berita Detiknews online di laman <https://news.detik.com/berita/3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>. Diakses pada 9 Mei 2017.

Inisiator Aksi Bela Islam I, II, III dan seterusnya	Ormas yang Menggunakan Simbol dan Wacana Islam untuk Mobilisasi Aksi Bela Islam II (411), III (212)	Ormas yang Menggunakan Simbol dan Wacana 'NKRI' dalam Aksi Bela Islam III (212)
FPI (Front Pembela Islam) / GNPf MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. GNPf-MUI (FPI, HTI, FUI, MMI Tarbiyah/P 2. KS) 3. Majelis Pelayan Jakarta (Gerakan Masyarakat Jakarta-GMJ) 4. Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah untuk Gubernur Muslim Jakarta 5. Badan Kerjasama Pesantren Indonesia 6. Al Irsyad 7. FS-LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) 8. Wahdah Islamiyah 9. Majelis Intelektual dan Ulama Muda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GNPf-MUI (FPI, HTI, FUI, MMI, Tarbiyah/PKS) 2. Aksi Bersama Rakyat (AKBAR) 3. Jaringan Merah Putih (JMP)/Gerindra 4. Forum Betawi Rempug (FBR) 5. Gerakan Bela Negara 6. Gerakan Indonesia Beradab

Tabel.01. Inisiator dan ormas-ormas yang menggerakkan aksi bela Islam (Sumber: Data penelitian, diolah oleh Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani)

Mobilisasi massa khususnya pada kaum Muslim baik di wilayah DKI Jakarta dan kemudian tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang ditunjukkan dalam Aksi Bela Islam, menurut sebagian pengamat adalah suatu model mobilisasi 'demonstrasi' dengan memaksakan kehendak atau 'mobocracy'⁵ yang didesain oleh GNPf-MUI khususnya yang sejak awal dimotori oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk memaksakan kehendak agar agenda politik mereka dapat mempengaruhi keputusan politik bahkan hukum dengan cara-cara mengkonstruksi

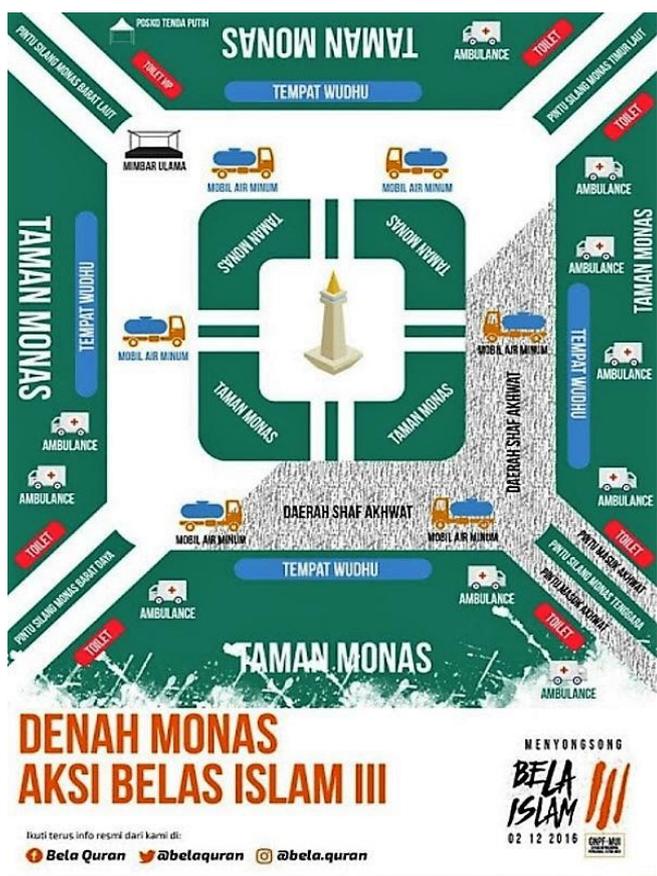
wacana publik dan menyebarluaskan dukungan melalui beragam sumberdaya khususnya dengan menggunakan sentimen agama sebagai basis yang dapat mempersatukan kepentingan politik antar ormas-ormas yang ikut terlibat, mengorganisir dan memobilisasi massa di tingkat akar rumput (grassroot). Meski demikian, Aksi Bela Islam II pada bulan November 2016 yang berakhir dengan kerusuhan telah menimbulkan reaksi di kalangan publik di Indonesia berupa wacana kontra yakni bahwa mereka (ormas-ormas khususnya ormas

⁵ Mobilisasi yang ditunjukkan melalui serangkaian aksi yang disebut Aksi Bela Islam, pada awalnya dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Aksi ini dalam analisis sosiologi sebenarnya merupakan suatu bentuk 'demonstrasi' massa yang ditujukan untuk melakukan tekanan secara paksa untuk kepentingan politik khususnya untuk kepentingan jangka pendek untuk suatu perubahan. Tekanan untuk perubahan politik dengan menggunakan

aksi massa seperti demonstrasi secara besar-besaran dengan cara memaksakan kehendak bahkan melalui kekerasan (baik secara fisik maupun secara simbolik) inilah yang sering disebut dengan istilah 'mobocracy' yang secara literal dalam bahasa Inggris berarti 'rule or domination by the masses' (diperintah atau didominasi dengan kekuatan massa). Sumber: majalah Tempo edisi 5-11 Desember 2016

Islam) yang mengorganisir Aksi Bela Islam adalah kelompok-kelompok Islam radikal, yang intoleran, dan bertujuan bukan hanya untuk 'Memerjarkan Ahok' semata, melainkan suatu 'makar politik' yang diarahkan pada pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi yaitu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, karena aksi itu sebenarnya ditujukan untuk mengganti konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi Islam radikal transnasional seperti mempromosikan sistem 'Khilafah Islamiyah' atau kekhalifan Islam dengan menggunakan 'syariat Islam' sebagai landasan hukum formal politik.

Politik pewacanaan yang demikian sangat cepat sekali berubah khususnya pasca Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 yang juga menimbulkan ketegangan politik antar elit politik di Indonesia, juga ikut mempengaruhi bagaimana pewacanaan mengenai 'Aksi Bela Islam' direproduksi melalui format pewacanaan baru dimana wacana yang disusun dan disebarluaskan kepada publik bukan hanya tentang 'membela Islam' semata-mata, tetapi bahwa kepentingan membela Islam itu ditujukan bagi 'persatuan dan kesatuan' nasional dimana umat Muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia masih menginginkan bentuk NKRI sebagai negara kesatuan dan bahwasanya aksi-aksi bela Islam selama ini sama sekali tidak melanggar ketentuan konstitusi dan bahkan dianggap (diklaim) sebagai manifestasi aspirasi suara umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam mobilisasi massa Aksi Bela Islam III, dukungan yang diberikan pada aksi ini mengalami 'perluasan simpati' bahkan dari beberapa komunitas majelis taklim dan para santri dari beberapa daerah di luar Jakarta. Perluasan simpati ini ditengarai muncul khususnya ketika media massa banyak memberitakan reaksi yang dimunculkan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) pasca Aksi Bela Islam II di bulan November 2016 melalui serangkaian tuduhan makar terhadap beberapa tokoh politik oposisi yang ditengarai ikut terlibat memfasilitasi dan memberi dukungan dalam aksi tersebut. Kalangan inisiator Aksi Bela Islam khususnya FPI dan juga GNPf-MUI mentafsirkan reaksi pemerintah Jokowi itu sebagai suatu bentuk kedzaliman oleh penguasa terhadap umat Islam. Inilah yang kemudian mendorong gelombang simpati publik khususnya kaum Muslim yang



Gambar 02. Denah (Peta) Lokasi Aksi Bela Islam 212 di Monas, Jakarta yang tersebar melalui Aplikasi WhatsApp (Sumber: dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas, 30 November 2016)

sebelumnya bahkan sama sekali tidak pernah menunjukkan simpati pada wacana-wacana yang dikemukakan oleh FPI (Front Pembela Islam) sebagai ormas Islam yang pertama-tama mewacanakan Aksi Bela Islam I atau aksi yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan memunculkan polemik penistaan agama oleh Ahok yang hanya didukung oleh sedikit massa FPI dan simpatisannya. Aksi itu menjadi meluas khususnya sejak Aksi Bela Islam II didukung juga oleh organisasi ekstra kurikuler termasuk yang diorganisasi oleh FS-LDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus), bahkan juga dukungan dari beberapa aktivis organisasi mahasiswa Islam seperti HMI. Dukungan bagi Aksi Bela Islam semakin membesar semenjak keluarnya fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok pada 9 November 2017 (hanya beberapa hari setelah Aksi Bela Islam II pada 4 November 2017). Dampak lain selain munculnya dukungan dan simpati yang sangat besar dari banyak kaum Muslim pada Aksi Bela Islam III atau Aksi 212, adalah bagaimana ormas-ormas Islam dan juga ormas-ormas lain non keagamaan menggunakan wacana NKRI di dalam mewacanakan 'Aksi Bela Islam' dan membuat pemerintah pada akhirnya ikut memfasilitasi aksi yang ditunjukkan melalui 'shalat Jumat' di lapangan Monas pada tanggal 2 Desember 2016, yang bahkan akhirnya

juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Jadi dapat dikatakan bahwa Aksi Bela Islam III merupakan 'momentum puncak' mobokrasi yang didesain secara sukses oleh inisiator dan ormas-ormas penggerak aksi itu maupun para elit politik yang sejak awal sudah menunjukkan dukungan terhadap aksi ini, misalnya seperti yang ditunjukkan melalui keterlibatan beberapa ormas non-Islam seperti contohnya JMP (Jaringan Merah-Putih) yang pernah terlibat dalam mobilisasi massa bagi pendukung salah satu Capres dari partai Gerindra pada pemilu 2014. Dukungan elit-elit politik khususnya mereka yang menjadi oposisi pemerintah saat ini (Jokowi) dalam Aksi Bela Islam meskipun tidak dimunculkan dalam kehadiran mereka di dalam aksi, tetapi nampak di dalam pernyataan-pernyataan yang mereka munculkan di media massa.⁶

B. Metode Penelitian dan Kerangka Teoritis

Studi mengenai Aksi Bela Islam ini dilakukan melalui dua metode. Pertama melalui observasi di media sosial dan metode analisis wacana dalam menginterpretasikan bentuk-bentuk representasi Aksi Bela Islam dan pewartannya yang muncul di jejaring media sosial khususnya Facebook dan Instagram. Kedua melalui metode etnografi visual

⁶ Salah satu pernyataan yang kontroversial pasca Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 yang berakhir dengan kerusuhan adalah pernyataan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang "Lebaran Kuda" yang isinya mengkritisi cara-cara pemerintah Joko Widodo menanggapi aksi bela Islam sehingga menimbulkan kerusuhan dan polemik di masyarakat. Lihat: Kompas Online di laman <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/02/14485661/sby.kalau.pendemo.diabaikan.sampai.lebaran.kuda.masih.ada.unjuk.rasa>. Diakses pada 14 November 2016.

Di satu sisi, pernyataan SBY itu justru mengundang reaksi negatif yang cukup besar dari para pendukung Jokowi dan khususnya para pendukung Ahok karena salah satu putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut maju di dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sebagai CaGub. Lihat juga respon Ahok setelah polemik 'Lebaran Kuda' SBY di laman berita online Tribunnews <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/16/sindir-ucapan-sby-soal-lebaran-kuda-ahok-apa-itu-tidak-menghina>. Diakses pada 20 November 2016.

dan observasi lapangan pasca Aksi Bela Islam yang puncak dukungannya terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di Lapangan Monas, Jakarta (Aksi 212), dan bagaimana kelanjutan aksi dan efek pewartannya dilanjutkan di dalam komunitas-komunitas Muslim yang mendukung gagasan atau ide 'membela Islam'.

Melalui observasi visual atas Aksi Bela Islam khususnya Aksi 212 yang muncul melalui kampanye-kampanye di media sosial seperti Facebook dan Instagram (*online representation*) dan bahkan yang menjangkau ruang privat seperti aplikasi WhatsApp, maka hasil penelitian menunjukkan bagaimana pola-pola pewartaan mengenai moralitas publik dilakukan khususnya di kalangan publik Muslim di Indonesia. Wacana ini bukan hanya direproduksi dalam bentuk ujaran, atau bahkan rujukan pada tafsir-tafsir ayat suci, melainkan juga bentuk-bentuk representasi yang divisualisasikan untuk menunjukkan '*magnitude*' atau besarnya pengaruh kekuatan dalam mempertunjukkan kekuatan 'massa' dalam aksi tersebut, serta pesan-pesan moral yang dimasukkan pula sebagai kepentingan politik khususnya oleh para penggerak aksi tersebut.

Observasi etnografis melalui pengamatan di dalam komunitas-komunitas Muslim yang mendukung wacana 'membela Islam' sebagai implikasi lanjutan pasca Aksi 212 ditujukan untuk menunjukkan bagaimana 'ruang publik Muslim' dikelola di dalam basis-basis komunitas yang bahkan pada awal sejarahnya sama sekali tidak memiliki kepentingan politik terhadap aksi itu (yang awal mulanya ditujukan sebagai kepentingan politik untuk memenjarakan Ahok) dan bahkan di dalam

komunitas Muslim yang sebenarnya secara ideologis memiliki perbedaan dalam memahami Islam dan aktivisme politik mereka dengan para inisiator yang menjadi motor penggerak aksi membela Islam. Melalui kajian etnografi mengenai komunitas luring (*offline community*) yang mendukung gagasan tentang 'membela Islam' maka dapat dikenali bagaimana wacana Aksi Bela Islam telah bertransformasi menjadi suatu gagasan atau wacana moralitas publik yang lebih luas dan memiliki basis sosial yang kuat di dalam komunitas-komunitas Muslim yang beragam.

Kerangka teoritis yang digunakan di dalam kajian ini bersandar pada konsep mengenai ruang publik Muslim (*Muslim public sphere*) yang digagas oleh Dale F Eickelman dan Jon W Anderson (2003) yang menggambarkan bagaimana kaum Muslim khususnya para intelektual Muslim di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim berusaha membangun pemahaman mereka tentang Islam dan berbagi gagasan tentangnya melintasi batasan-batasan geografi fisik, kultural (bahasa dan etnisitas) yang semuanya dimungkinkan melalui pemanfaatan teknologi media baru (*new media*) termasuk memvisualisasikan gagasan itu sebagai bagian dari strategi dakwah Islam. Gagasan tentang Islam yang divisualisasikan itu dapat dibagikan dan digandakan bahkan dengan kecepatan sebagai upaya merekam narasi-narasi otentik tentang Islam dan narasi-narasi tentang keshalehan kaum Muslim yang selalu dapat diinterpretasikan ulang bahkan dapat keluar dari 'konteks' awal dimana materi-materi visualisasi itu berasal. Media teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat khususnya melalui medium internet telah memungkinkan munculnya 'narasi bergerak'

(*shifting narratives*) tentang Islam melalui upaya untuk mencari kebaruan yang sifatnya 'kekinian' sehingga kaum Muslim dapat mencari relevansi atau kaitan dari jejak sejarah dakwah Islam di masa lalu hingga ke masa kini (sekarang) bahkan dapat mengklaim otoritas atas otentisitas Islam di masa lalu bagi konteks sosial, budaya dan politik yang berbeda di masa kini.⁷ Upaya untuk memvisualisasikan narasi bergerak tentang Islam dimungkinkan melalui teknologi media sehingga dapat mempengaruhi perubahan lanskap budaya bahkan politik kaum Muslim di seluruh dunia dan bahkan juga ikut mempengaruhi lanskap kemanusiaan (ekonomi, sosial dan politik) secara global. Upaya untuk mengkonstruksi wacana bergerak tentang Islam inilah yang disebut sebagai 'mediatisasi dakwah'.⁸ Mediatisasi adalah suatu konsep yang berkembang di dalam teori media yang menjelaskan proses yang melibatkan wacana dan strategi pewacanaan melalui media sebagai suatu bentuk komunikasi politik yang dimediasikan lewat beragam medium sehingga dapat direkam, digandakan dan bahkan dimultitafsirkan untuk beragam kepentingan termasuk kepentingan politik dan bahkan kepentingan kapital ekonomi.

Sementara itu keberadaan komunitas luring atau '*offline community*' menunjuk pada mereka yang tidak memunculkan dirinya di media sosial secara terbuka dengan beragam alasan. Alasan yang acapkali muncul adalah keterbatasan akses terhadap teknologi khususnya internet maupun karena alasan-alasan yang bersifat personal (punya

akses meskipun terbatas tetapi tidak aktif) tetapi mengkonfirmasi suatu wacana khususnya tentang 'membela Islam' karena dikonstruksikan di dalam dakwah sehari-hari oleh komunitas-komunitas yang berjejaring melalui media sosial. Materi dakwah tentang 'membela Islam' tersebar secara cepat melalui 'smartphone' dan secara memdiatisasikan dakwah yang sebenarnya sarat dengan kepentingan politik. Meskipun dakwah sendiri berkonotasi sebagai suatu aktivitas yang bersifat positif, tetapi mediatasi dakwah yang melipatgandakan informasi dan bentuk-bentuk visualisasi yang acapkali 'tercerabut dari konteks awalnya' justru menunjukkan bagaimana apropriasi dakwah terhadap industri kapitalis moderen khususnya melalui media sosial itulah yang memungkinkan celah bagi upaya untuk 'memediatasikan muatan dakwah' bagi kepentingan individu atau kelompok. Komunitas luring yang memiliki agensi sosial yang mengakar di dalam komunitas memiliki kecenderungan untuk membangun kepercayaan atas kebenaran pewacanaan mediatisasi dakwah tersebut secara subyektif di dalam keseharian hidup mereka. Agensi sosial kaum Muslim sebagai konsumen media dakwah melipatgandakan dirinya melalui jejaring sosial dalam kehidupan sehari-hari dan mengkonfirmasikan solidaritas mereka dan mengkonfirmasi "wacana membela Islam" ke dalam realitas subyektif kehidupan kaum Muslim yang sehari-hari-dia dicitrakan sebagai kelompok yang terpinggirkan dan termarginalisasikan. Wacana membela Islam karenanya dikonstruksikan sebagai

⁷ Eickelman, Dale, dan Anderson, Jon. 2003. *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Hal. 1-20.

⁸ Pamungkas, Arie Setyaningrum. 2016. "Membela Islam (?): Memahami Muslim Public Sphere di Indonesia". Artikel Online di Jurnal Remotivi dimuat pada laman <http://www.remotivi.or.id/amatan/340/Membela-Islam>. Diakses pada 8 Desember 2016.

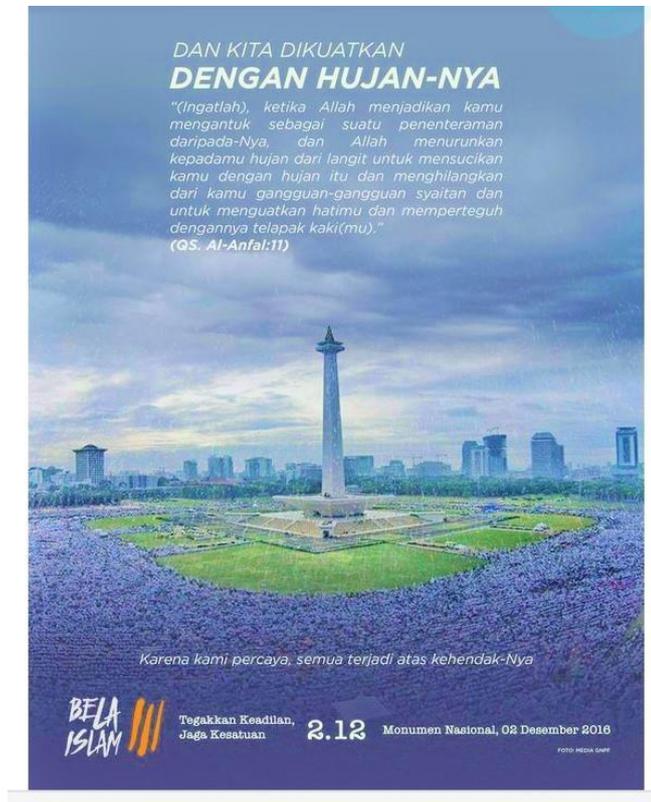
bagian dari moralitas publik melalui standar etis dan moral tertentu, regulasi (disiplin), dan acapkali dibentuk pula oleh kepanikan moral, sebagaimana yang dimunculkan dalam pewacanaan tentang Aksi Bela Islam sebagai wacana yang masih berada di dalam 'koridor' mematuhi norma-etika dan aturan mengenai kewargaan Indonesia yang baik yaitu yang menghormati eksistensi NKRI. Dalam konteks ini, wacana 'NKRI' merupakan wacana mengenai bentuk dan ekspresi nasionalisme sebagai bentuk 'moralitas publik' yang bersifat sekuler dimana Islamisme (aktivisme Islam politik) selalu dihadapkan sebagai ancaman bagi 'Bhinneka Tunggal Ika' suatu nilai etis-moral kohesi nasionalisme yang secara faktual dibangun diatas keragaman latar-belakang budaya, etnisitas, keagamaan di Indonesia. Meskipun sesungguhnya dalam 'Aksi Bela Islam' yang mewacanakan 'membela Islam dan NKRI' itu secara pragmatis diwacanakan oleh para penggerak aksi tersebut sebagai 'wacana tanding' atas tuduhan bahwa gerakan tersebut ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang konstitusional dan berpotensi memecahbelah kesatuan nasional. Perang pewacanaan ini yang akan dibahas di dalam analisis berikutnya mengenai 'representasi aksi bela Islam' di media sosial. Implikasi aksi dan transformasi wacana 'membela Islam' sebagai bentuk-bentuk mengkonstruksi moralitas publik melalui komunitas luring akan dibahas dalam analisis berikutnya di dalam artikel ini. Transformasi gerakan dakwah secara global melalui budaya populer di Indonesia sebagaimana yang muncul melalui media Islam semakin diperkuat melalui persebaran wacana tentang 'moralitas publik' sehingga membentuk suatu komunitas besar pemirsa Muslim (secara

teoritis disebut sebagai 'Muslim public sphere') yang bukan sekedar mengkonsumsi media, melainkan ikut menggerakkan sebagai bagian dari produksi wacana. Sehingga ketika gerakan dakwah global melalui bentuk-bentuk yang termediasikan secara massif itu telah memiliki publiknya yakni 'para pemirsa Muslim', media yang ditambihkan akan selalui memunculkan tema tentang moralitas publik meskipun hal tersebut ditujukan untuk kepentingan politik tertentu (sebagaimana yang kita saksikan pada Aksi Bela Islam), dan sekaligus membentuk pasar media 'Muslim', dan bahkan pengikut ideologis.

C. Representasi 'Daring' (Online) Aksi Bela Islam di Media Sosial

Melihat struktur anggota GNPF-MUI berlatar-belakang dari berbagai organisasi Islam, pengelompokan ini dilihat dari latar belakang status anggotanya yakni Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Bela Negara, Majelis Mujahidin Indonesia, Partai Gerindra, Badan Kerjasama Pesantren Indonesia, Pimpinan Al Irsyad, dan Gerakan Indonesia Beradab. Relasi kuasa yang berlangsung di ranah daring (online) dengan segala konstruksinya juga mempengaruhi dinamika yang terjadi di ruang luring (offline). Ruang maya memberikan peluang situs berita online untuk menyediakan bagi partisipasi publik. Ruang komentar menjadi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam pergulatan wacana yang terjadi baik itu di ranah offline dan online. Ruang maya memberikan kebebasan bagi publik untuk

mengklaim ruang interpretasi realitas yang berlangsung di ruang offline, seperti halnya kritik kepada kelompok-kelompok tertentu.



Gambar 03. Poster Yang disebarluaskan pasca Aksi Bela Islam 212 Melalui Instagram (Sumber: dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas.)⁹

Facebook menjadi titik awal mencuatnya pemberitaan terkait penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersebar melalui akun facebook Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016. Sebanyak 346,354 tayangan penyebaran wacana dan sebanyak 11.033 kali dibagikan ulang (reshared). Video sebagai salah satu produksi

pengetahuan disempurnakan dengan caption menambah rasa ingin tahu pemirsa media sosial meningkat. Video yang diunggah dengan 346.364 tayangan, 3,8 ribu *emoticon* dan 11,033 komentar tersebut merupakan pemicu Aksi Bela Islam II (411) dan III (212). Buni Yani menuliskan status dan caption videonya pada tanggal dengan kalimat sebagai berikut:

"Penistaan terhadap Agama?"

"Bapak-Ibu [pemilih muslim]...dibohongi surat Al-Maidah ayat 51.."[dan] masuk neraka [juga Bapak-ibu] dibodohi.."

"Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini"

Penulisan status Facebook yang tidak utuh dengan video tayangan yang diambil dari potongan rekaman melalui fitur video di *smartphone* turut memberi andil pada eskalasi (peningkatan) polemik mengenai penistaan agama. Respon terhadap unggahan video sangat cepat dengan setting terlihat oleh publik. Media sosial menjadi pelancar wacana dominan dalam Aksi Bela Islam.

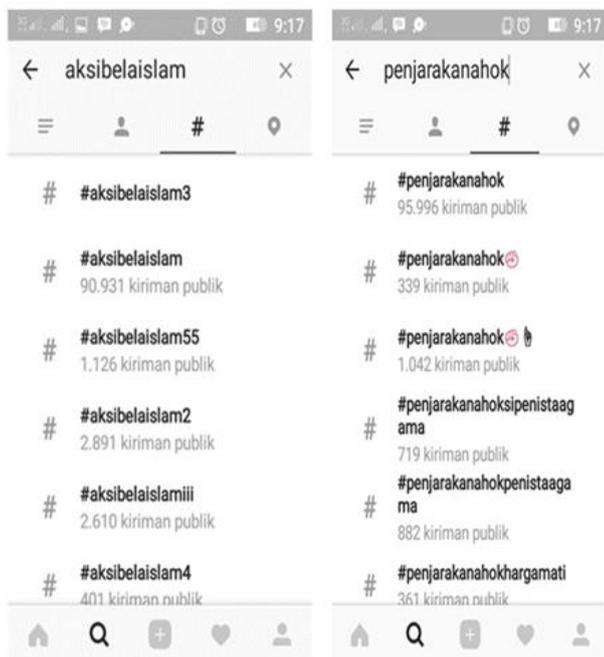
Berbeda dengan Facebook, dalam media sosial Instagram, durasi video mejadi pembatas video tersebut ditayangkan. Teaser atau video pendek mengenai 'potongan kalimat yang diucapkan Ahok' sebagaimana yang dipopulerkan oleh akun Facebook milik Buni Yani direproduksi ulang dan semakin populer melalui Instagram sehingga pemirsa semakin besar rasa keingintahuan atas tayangan penuh video tersebut. Bagian-bagian tertentu ditampilkan sebagai bentuk citra sebelum

⁹ Akun Bela Quran Official Account GNPf-MUI | FB: Bela Quran - Twitter: @BelaQuran | #Spirit212Ramadhan | #SpiritBerjamaah | #BelalIslam | #BelaUlama

BelaQuran.com
<https://www.instagram.com/bela.quran/?hl=en>. Diakses 10 Juni 2017pk. 23.12.

video ditayangkan secara utuh. Instagram menjadi alternatif lain pencarian berita mengenai polemik 'video Ahok' tersebut. Dalam durasi 56 detik pada aplikasi Instagram, video tersebut dengan cepat tersebar dan 'dikonstruksi' makna-nya melalui 'caption judul dan hashtag (#)' untuk mendulang popularitas memperoleh perhatian (jumlah tayangan atau *view*) dan komentar, juga 'disukai' (*like*).

Islam, identitas seorang muslim bisa dikenal dengan sikapnya di media sosial dalam menanggapi aksi, melalui tanggapannya terhadap aksi netizen juga bisa melacak seseorang itu berlatar belakang Islam dari golongan yang mana. Identitas tak lagi memiliki ruang privasi. Kini masyarakat telah termediasi dan dimediasi oleh internet, perangkat digital, dan perangkat komunikasi dalam interaksi sosialnya. Selfie merupakan suatu sistem gambar mengubah hal yang biasa menjadi *hyper-realitas* dari sebuah aksi mengabadikan diri. Memperlihatkan eksistensi pelaku selfie terhadap dirinya sendiri, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam interaksi sosial yang tak lagi dalam dimensi tatap muka pada waktu tertentu, melainkan interaksi sosial dalam dimensi non-fisik, tidak pada waktu khusus dan tidak pula pada tempat yang khusus.



Gambar 04. Contoh Hashtag (#) dalam fitur pencarian 'Aksi Bela Islam' (90.931 kiriman) dan 'Penjarakan Ahok' (95.996 kiriman) di Instagram (Sumber: dokumentasi Gita Octaviani)¹⁰

Konstruksi mengenai identitas dilanggengkan oleh media sosial, meskipun pemilik akun telah hilang dari zaman, identitasnya bisa ditemukan melalui media sosial. Begitu juga dengan peristiwa Aksi Bela

¹⁰ Foto diperoleh melalui penggunaan fitur hastag #aksibelaislam3 dengan mengakses laman Instagram

<https://www.instagram.com/> Diakses 2 Juni 2017, pk. 21:04



Gambar 05. Selfie para pendukung Aksi Bela Islam III (212) di Instagram (Sumber: dokumentasi Gita Octaviani)¹¹

“Kebersihan sebagian dari iman” merupakan framing pewacanaan lain yang digunakan dalam Aksi Bela Islam. Symbolisasi terhadap ‘kebersihan’ juga diwacanakan sebagai suatu wujud ‘perjuangan’ bela islam. Wacana ini dilegitimasi melalui dukungan para santri di dalam Aksi Bela Islam III yang dalam kegiatan sehari-harinya terbiasa mengerjakan piket kebersihan di pondok pesantren mereka. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber penelitian yang sempat bergabung di dalam Aksi Bela Islam 212:

¹¹ Foto diperoleh melalui penggunaan fitur hashtag #aksibelaIslam3 dengan mengakses laman Instagram <https://www.instagram.com/>. Diakses 2 Juni 2017, pk. 21:04

“Pandangan apa yang pertama kali masyarakat awam pikirkan ketika ditanya tentang keikutsertaan dalam aksi ini? Anarki, bakar ban, teriak-teriak?!”

Demikian pandangan umum aksi menurut salah seorang peserta Aksi Bela Islam bernama Maulana (bukan nama yang sesungguhnya). Pada peristiwa aksi ini, penggerak aksi bersih-bersih diinisiasi oleh komunitas pesantren Darut Tauhid, pondok pesantren milik Aa Gym. Konstruksi bahwa Aksi Bela Islam III (212) dilakukan secara ‘bersih dan damai’ telah menetralsir pandangan para netizen di media sosial Facebook yang sebelumnya menganggap aksi itu penuh dengan ‘kekerasan’ dan kekisruhan.



Gambar 06. Foto Aa Gym menyapu pasca Aksi Bela Islam II (414) yang sempat menghilang dari Facebook (Sumber: dokumentasi Gita Octaviani).¹²

¹² Foto dibagikan ulang melalui laman Facebook Akun Astaman Satri, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010960713684>. Diakses 9 Juni 2017 09:01

Penokohan merupakan suatu cara untuk mengefektifkan penyebaran Informasi Aksi Bela Islam. Habib Muhammad Rizieq Shihab adalah tokoh terdepan dalam Aksi Bela Islam, ia menjadi rujukan pertama ketika para pendukung Aksi Bela Islam memposting status di media sosial sebagai bentuk dukungan mereka. Status facebook seorang tokoh masyarakat pasti memiliki banyak pembaca dan menjadi rujukan untuk dibagikan ke publik. Berbeda dengan status facebook netizen pada umumnya adalah 'orang biasa' dan memiliki audiensi ruang pembaca terbatas. Bachtiar Nasir adalah tokoh sentral dalam GNPf MUI yang juga sentral dimunculkan melalui media sosial penokohnya. Akunnya ketika dicari di search engine hanya ditemukan satu, namun ketika ia memposting gambar beserta seruan Aksi Bela Islam, 2,5 ribu akun memberikan emoticon, 735 kali dibagikan, dan 113 komentar terhadap postingannya. Hal yang sama juga berlaku pada tokoh-tokoh Muslim lainnya yang tidak mendukung Aksi Bela Islam, seperti Habib Umar bin Hafidz dan Said Agil Siraj. Mereka berpendapat bahwa aksi tersebut lebih menyerupai demonstrasi dan berisiko pada 'perpecahan umat Muslim di Indonesia'. Karena tugas Muslim yang baik, menurut mereka adalah bertakwa dan bukan dengan cara-cara berdemonstrasi. Said Agil Siraj dan Habib Umar bin Hafidz merupakan tokoh yang diambil pendapatnya oleh kalangan Nahdhatul Ulama yang menganggap bahwa menarik diri dari demo lebih baik dan informasi itu juga disebarakan melalui media sosial.



Gambar 07. Poster Undangan Aksi Bela Islam (dengan menggunakan foto-foto para tokoh-tokoh Muslim yang tergabung dalam GNPf-MUI didampingi oleh wakil aparat pemerintah yakni di sebelah kiri Kapolri, Tito Karnavian dan di sebelah kanan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo) yang tersebar melalui media sosial (Sumber: WhatsApp, dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas, 30 November 2016)

Kesuksesan memobilisasi dukungan massa dalam Aksi Bela Islam juga dilakukan dengan 'meromantisasi' kehidupan kaum 'santri pinggir'an yang rela mengorbankan apapun demi membela 'martabat iman Islam' mereka. Hal ini sempat menjadi sorotan pemberitaan di media massa terkemuka di Indonesia, yang sebelumnya juga dimobilisasikan oleh simpatisan dan kader GNPf-MUI melalui media sosial. Misalnya, tentang 'Aksi Jalan Kaki Santri dari Ciamis' ke Jakarta untuk mendukung Aksi Bela Islam III yang sempat dicegah kedatangannya oleh aparat keamanan (kepolisian). Para santri yang berjalan kaki itu tidak dapat berangkat dengan transportasi umum karena

kepergian mereka dicegah aparat keamanan dan karenanya memutuskan untuk 'berjalan kaki'. Reaksi yang dimunculkan dari peristiwa itu amat 'emosional' dan membangun sentimen simpati dari beragam kalangan Muslim khususnya dan serta merta mengorganisasikan dukungan untuk memberikan 'logistik' bagi para santri dari Ciamis yang hendak ikut Aksi Bela Islam itu. Narasi yang dimunculkan melalui media sosial dan kemudian menjadi liputan media mainstream tentang aksi jalan kaki para santri inilah yang memunculkan sentimen emosional, sehingga justru dukungan untuk Aksi Bela Islam III (212) justru semakin besar.

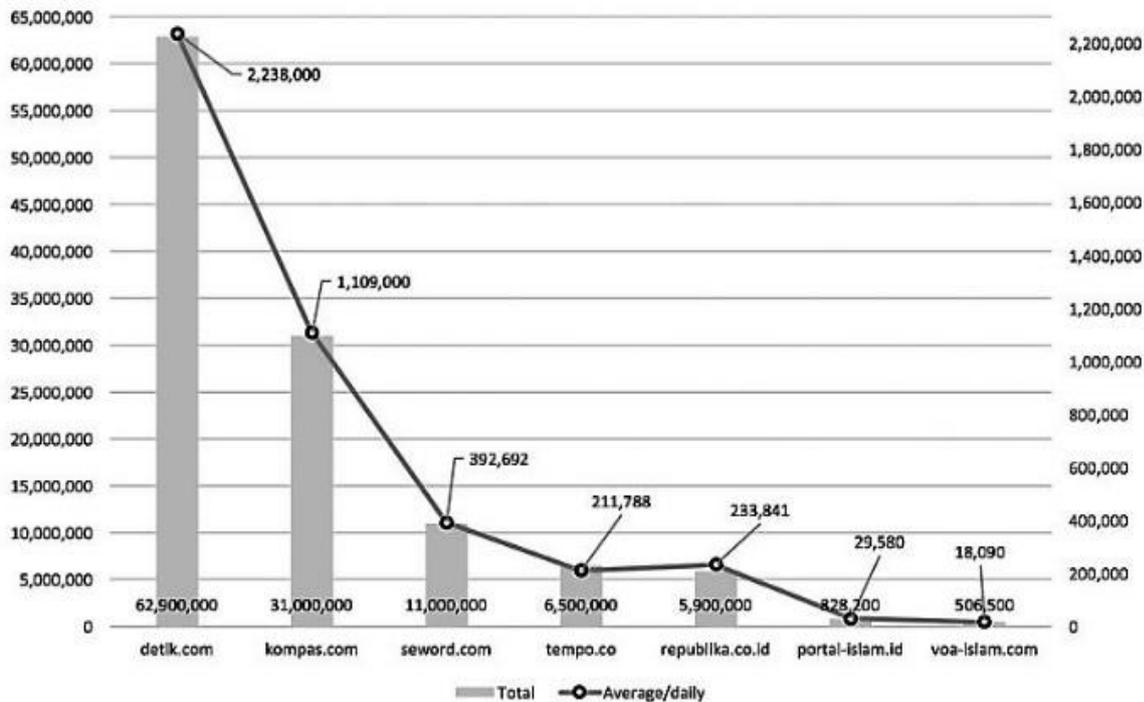


Gambar 08. Foto yang disebarluakan di Instagram tentang dukungan logistik makanan dan minuman bagi para santri dari Ciamis yang berjalan kaki menuju Jakarta untuk bergabung dalam Aksi Bela Islam III (212) (Sumber: dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas).¹³

Citra buruk tentang kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang adalah seorang non-Muslim muncul sebagai sentimen emosional yang memperkuat dukungan terhadap Aksi Bela Islam. Citra ini muncul dikarenakan kebijakan-kebijakan Ahok yang dianggap kurang berpihak pada kaum miskin kota di Jakarta, juga beberapa insiden yang sebelumnya melibatkan konflik Ahok dengan beberapa tokoh masyarakat Betawi di Jakarta, seperti misalnya dengan 'Haji Lulung' yang menguasai akses ekonomi informal, juga perseteruan Ahok dengan seorang guru SMA di DKI Jakarta, yang seorang muslimah. Gambaran buruk itu dibingkai juga melalui berita-berita hoax dan ujaran-ujaran kebencian terhadap Ahok. Disisi lain, reaksi yang dimunculkan oleh para pendukung Ahok, juga menyertakan tautan-tautan ungkapan yang membingkai umat Muslim yang anti Ahok sebagai kelompok-kelompok radikal Islam, justru memperkeruh suasana pada saat sebelum dan setelah Aksi Bela Islam 212. Penelitian Merlyna Lim (2017) tentang bagaimana media sosial digunakan sebagai 'ajang perseteruan' dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bagaimana polarisasi terbentuk melalui media sosial dan bagaimana media-media tertentu ikut membantu polarisasi tersebut.

¹³ Foto diperoleh dengan menggunakan fitur hashtag #AksiBelaIslam3 dan hashtag #Ciamis dengan

mengakses Instagram <https://instagram.com>, Diakses pada 29 November 2016 pk. 01.05



Gambar 09. Trafik (arus kepadatan akses) pada situs-situs media tertentu tentang polemik kasus Ahok dan Aksi Bela Islam di media massa pada bulan Oktober 2016 – Maret 2017 menurut studi Merlyna Lim, 2017 yang ikut membentuk ‘kantong-kantong’ polarisasi politik di media sosial melalui tautan yang dibagikan oleh para netizen.¹⁴

Dari studi Merlyna Lim (2017) yang menggunakan metode riset kuantitatif untuk melihat bagaimana algoritme di media sosial telah menciptakan ‘kantong-kantong’ atau pengelompokan polarisasi dari polemik kasus Ahok dan Aksi Bela Islam, menunjukkan bahwa para netizen pengguna media sosial secara online aktif membagikan tautan tentang berita-berita yang muncul di media massa mengenai polemik Ahok dan Aksi Bela Islam, sehingga memperkuat polarisasi politik yang direpresentasikan melalui media sosial.

D. Post-Event Aksi Bela Islam 212: Komunitas Luring ‘Membela Islam’ di Yogyakarta

Hal yang membuat Aksi bela Islam menjadi polemik adalah bahwa aksi tersebut berkaitan dengan momentum Pilkada di DKI Jakarta, dan karenanya tuntutan untuk memenjarakan Ahok dengan pasal penistaan agama merupakan agenda politik yang sejak awal sudah dirancang dalam aksi tersebut oleh inisiator dan penggeraknya (GNPF-MUI). Polemik tersebut bukan hanya menjadi perhatian nasional bahkan juga internasional, khususnya dalam mencermati polarisasi yang terjadi sebagai dampak

¹⁴ Lim, Merlyna. 2017. “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia”. *Critical Asian Studies*, 2017: 9. DOI:

<http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>. Diakses pada 28 Juni 2017.

aksi tersebut dimana kampanye-kampanye media sosial yang muncul telah mempolarisasi bukan hanya 'voters' atau pemilih di Jakarta, melainkan juga mobilisasi dukungan yang berbasis pada politisasi identitas. Keprihatinan yang paling utama berkenaan dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang selama ini diakui dunia internasional sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim di dunia yang toleran dan mampu mengatasi friksi, konflik dan perpecahan yang berdasarkan SARA. Polarisasi yang muncul melalui media sosial seakan-akan menempatkan posisi para netizen (pengguna media sosial) jika Anti Ahok dianggap sebagai 'pendukung rasisme yang intoleran' dan jika mendukung Ahok sebagai 'pendukung keragaman (pluralisme) yang sekuler'.¹⁵ Keberadaan Aksi Bela Islam, memperumit kondisi tersebut, meski para penentang kebijakan-kebijakan Ahok, jauh sebelum adanya aksi-aksi 'Bela Islam' tersebut juga datang dari beberapa kelompok berbasis HAM seperti misalnya UPC (*Urban Poor Consortium*), yang juga sebenarnya tidak menyepakati digunakannya isu politisasi agama untuk menyerang Ahok.



Gambar 10. Poster Gerakan Subuh Berjamaah yang pada awalnya digerakkan oleh FS-LDK di seluruh Indonesia yang dimulai sejak Oktober 2016 yang muncul di media sosial (Sumber dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas)¹⁶

Apa yang ditunjukkan oleh Aksi Bela Islam khususnya dalam Aksi 212 adalah suatu kemampuan untuk memobilisasi sentimen 'agama' secara efektif tetapi dapat berdampak pada munculnya benih-benih kebencian yang mengatasnamakan agama dan rentan untuk difabrikasi sebagai kepentingan politik. Moralitas publik dalam konteks ini adalah bagaimana konsepsi mengenai 'toleransi' ditujukan untuk lebih pada

¹⁵ Feally, 2017; Lim, 2017.

¹⁶ Foto diperoleh dengan mengakses Laman FS-LDK di Facebook

<https://www.facebook.com/FSLDKIndonesia/>. Diakses 20 Januari 2017.

memberi penghormatan pada nilai-nilai yang dikonstruksikan kelompok mayoritas, dalam konteks inilah GNPf-MUI berhasil membangun konstruksi moral tentang 'persatuan umat Islam' dengan membingkai kasus Ahok sebagai suatu ajakan moral yang politis untuk membela Al Quran, membela ulama dan mengekspresikan bentuk pembelaan tersebut dengan bergabung di dalam pengorganisasian gerakan tersebut. Dalam konteks ini, mobilisasi aksi bukan hanya ditujukan pada kepentingan politik jangka pendek (yaitu memenjarakan Ahok, dan tercapai), melainkan juga upaya untuk 'memelihara dukungan massa' yang telah mereka peroleh pasca Aksi Bela Islam 212 pada awal Desember 2016 di Jakarta. Upaya memelihara dukungan massa dalam bingkai wacana politik moralitas sebagaimana yang dikehendaki oleh GNPf-MUI itu dimulai melalui strategi membangun komunitas yang bukan hanya diperoleh melalui dukungan karena kampanye-kampanye di media sosial, melainkan juga untuk memperkuat basis massa secara konkrit, dan digagas melalui 'Gerakan Subuh Berjama'ah' secara nasional. Pemanfaatan medium 'ibadah' merupakan suatu cara untuk mengaburkan kesan bahwa gerakan tersebut diorkestrasi secara koersif (dengan cara-cara memaksa dan anarkis). Melalui Gerakan Subuh Berjama'ah di beberapa mesjid di seluruh Indonesia yang kemudian diikuti oleh 'Safari' itu ditujukan untuk terus 'menggaungkan' wacana 'membela Islam'. Suatu wacana yang mengkondisikan umat

Muslim untuk menyepakati wacana-wacana mengenai ancaman terhadap 'penistaan agama Islam'. Salah satu wacana yang paling menonjol dalam gerakan ini sebagai suatu 'framing' atau upaya membingkai suatu pengkondisian atas ancaman penistaan terhadap Islam adalah wacana 'Indonesia darurat komunisme (PKI)'. Suatu rekayasa wacana yang terus dipelihara di dalam forum-forum pengajian, dan juga khotbah termasuk di dalam ceramah di mesjid-mesjid dimana para penggerak aksi memiliki akses kepada jamaahnya. Meskipun kenyataannya, PKI telah berpuluh-puluh tahun yang lalu dimusnahkan oleh rezim Orde Baru, tetapi wacana 'kebangkitan PKI' yang merupakan wacana militerisme dari masa Orba tersebut terus dipelihara khususnya ditujukan pada ekspresi kritis, bukan hanya pada gerakan-gerakan kiri, organisasi-organisasi HAM, juga bahkan pada kelompok-kelompok liberal sekalipun di Indonesia.¹⁷

¹⁷ Salah satu tokoh muslim yang menggaungkan isu kebangkitan PKI, adalah ustad Alfian Tanjung, yang bahkan sempat menuduh pemerintahan Joko Widodo sebagai 'rezim' yang dikuasi oleh simpatisan PKI (Komunis) melalui beberapa ceramah termasuk dalam ceramah shalat subuh di beberapa mesjid dan forum

majelis taklim. Video-video rekaman ceramah Alfian Tanjung mengenai 'kebangkitan PKI melalui pemerintahan Jokowi' tersebar luas di Youtube dan disebarluaskan melalui media-media sosial termasuk di dalam tautan media-media sosial kelompok-kelompok yang berafiliasi di dalam 'Aksi Bela Islam'.



Gambar 11. Poster 'Gerakan Subuh Berjamaah' yang dibuat oleh pengurus Mesjid Jogokaryan, Yogyakarta, sebagai dukungan untuk 'Memilih Pemimpin Muslim' di Pilkada DKI Jakarta (Sumber: WhatsApp, dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas, 12 April 2017)

Melalui Gerakan Subuh Berjamaah (GSB), wacana mengenai moralitas publik untuk 'membela Islam' dibingkai untuk mendisiplinkan 'publik Muslim' tentang pentingnya kepemimpinan umat Muslim dan identitas keshalehan Islam dalam bentuk jihad melawan penistaan terhadap Islam termasuk ancaman kebangkitan komunisme, persuasi tentang pentingnya syariah Islam (meskipun tidak dijelaskan syariah yang dimaksudkan akan

berbentuk seperti apa di dalam sistem hukum legal formal di Indonesia), pentingnya membangun 'solidaritas antar umat Muslim', fabrikasi peranan tokoh-tokoh Muslim dalam sejarah nasional khususnya wacana tentang 'Piagam Jakarta' yang menghendaki diberlakukannya syariah Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, wacana ketertindasan umat Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia, bahkan wacana ancaman asing dan sentimen anti etnis Tionghoa. Meski demikian, wacana mengenai 'membela Islam' yang mengkaitkan tema yang membingkai tema 'takfiri' atau meliyankan kaum non-Muslim sebagai ancaman terhadap Islam, sebenarnya bukan sesuatu yang stabil digaungkan di mesjid-mesjid termasuk dalam Gerakan Subuh Berjamaah. Hal ini mulai terjadi khususnya setelah polemik Ahok berakhir dengan kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta dan kemudian dipenjarakannya Ahok. Bahkan kasus 'Habib Rizieq' dengan kasus 'Chat Mesum' yang disangkakan Polisi telah melakukan pelanggaran UU ITE dan UU Pornografi dan coba digaungkan kembali oleh GNPF-MUI melalui gerakan Aksi Bela Islam IV-VII di sepanjang tahun 2017 melalui wacana 'Bela Ulama' tidak menimbulkan amplifikasi dukungan massa sebesar Aksi Bela Islam III (212) pada Desember 2016.



Gambar 12. Kegiatan Subuh Berjamaah di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta (Sumber: dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas).¹⁸

Seiring dengan meredanya polemik Ahok dan berakhirnya Pilkada DKI Jakarta, serta munculnya kasus Habib Rizieq di media massa, tekanan terhadap GNPf-MUI justru semakin menguat. Puncak dari tekanan itu kemudian memunculkan friksi dan konflik internal di dalam tubuh GNPf-MUI

¹⁸ Foto didapatkan melalui akun Instagram Masjid Jogokaryan di akses melalui laman <https://www.instagram.com/masjidjogokariyan/>. Diakses pada 14 April 2017.

¹⁹ Ustad Sambo dengan didukung oleh Amien Rais, pada tanggal 27 Juni 2017 memberikan pernyataan sikap terkait pertemuan tokoh-tokoh GNPf-MUI dengan Presiden Joko Widodo. Pernyataan sikap tersebut disebut sebagai 'Deklarasi Yogya'. Pernyataan sikap tersebut

semenjak para pimpinan kelompok itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana negara pada tanggal 25 Juni 2017 yang kemudian diikuti oleh diumumkannya HTI sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada bulan Juli 2017. Friksi yang muncul di publik tentang konflik internal di dalam GNPf-MUI yakni antara kubu Bachtiar Nasir yang memilih untuk 'berkompromi dengan pemerintahan Presiden Jokowi' dengan kubu 'Ansufrri Idrus Sambo' atau 'ustad Sambo' yang menjadi ketua Presidium Alumni 212 yang menentang pertemuan tersebut.¹⁹ Perpecahan yang lain dengan kubu Bachtiar Nasir juga muncul semenjak didekrasikannya Partai Syariah oleh Siti Asmah Ratu Agung salah seorang pendakwah populer yang dianggap dekat dengan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, yang merupakan partai oposisi di dalam parlemen maupun eksekutif pemerintahan saat ini.²⁰

berisikan kecaman terhadap pertemuan yang dianggap tidak netral dan dianggap mencederai semangat Aksi Bela Islam 212. Pernyataan sikap tersebut dimuat secara online di laman <http://obsessionnews.com/sikap-presidium-alumni-212-atas-pertemuan-gnpf-mui-dan-jokowi/> Diakses pada 30 Juni 2017.

²⁰ Lihat sumber berita Tempo online di laman <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/17/078892053/tujuh-alumni-aksi-212-mendeklarasikan-partai-syariah-visinya>. Diakses pada 18 Juli 2017.



Gambar 13. Contoh Leaflet promosi pesantren jaringan Wahdah Islamiyah di Yogyakarta yang mendidik para calon-calon ustad untuk dakwah populer (Sumber: Leaflet Cetak, dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas, Juni 2017)

Konflik internal di dalam tubuh GNPf-MUI dan persoalan kasus hukum Rizieq Shihab yang belum tuntas karena ia melarikan diri ke Arab Saudi, membuat wacana tentang Aksi Bela Islam ‘meredup’.

Meski demikian, sebagian anggota alumni 212 tetap mewacanakan ‘membela Islam’ di basis-basis komunitas mereka dengan pewacanaan moralitas tentang ‘persatuan umat Islam’. Salah satunya adalah melalui kegiatan di pesantren dan mesjid yang dikelola oleh jaringan ‘Wahdah Islamiyah’ (yang secara literal berarti ‘Persatuan Islam’). Jaringan yang pada awalnya adalah sebuah pesantren di Sulawesi Selatan (Yayasan Fathul Muin) ini mengembangkan jaringannya dan menekankan pentingnya ‘keshalehan individu’, oleh karena itu jaringan ini mengembangkan kegiatannya pada pelembagaan pendidikan dan dakwah-dakwah populer. Strategi dakwah yang dikembangkan jaringan ini menekankan pada aspek-aspek pembangunan karakter individual yang shaleh, tetapi wacana ‘moralitas’ keshalehan itu juga mewacanakan ‘meliyankan’ kelompok-kelompok lain seperti sikap anti Ahmadiyah, anti Syiah, dan anti kelompok LGBT di Indonesia. Pesantren yang dikelola oleh jaringan ‘Wahdah Islamiyah’ termasuk yang berada di Yogyakarta, masih mewacanakan di dalam komunitas tentang kepemimpinan Muslim dan pentingnya ‘membela Islam’ dari pengaruh ghazwul fikri atau perang pemikiran seperti gagasan-gagasan pluralisme. Meskipun jaringan ini berkembang melalui kegiatan pendidikan dan pembangunan pesantren-pesantren dakwah di beberapa tempat di Indonesia, jaringan Wahdah Islamiyah juga memiliki fasilitas pembelajaran dakwah secara ‘online’ melalui situs ‘Belajar Islam’.²¹

²¹ Laman website Belajar Islam <https://belajarislam.com/> yang juga menyediakan akses pembelajaran secara online melalui media sosial dan aplikasi ‘Telegram’ yang dapat

berbasis pada komunikasi personal (personal chat) dalam bentuk grouping (atau pengelompokan).



Gambar 14. Poster Iklan 'Kajian Akbar Subuh' yang ikut dipromosikan oleh komunitas 'Teras Dakwah' dan disebarakan melalui media sosial (Sumber: WhatsApp, dokumentasi Arie Setyaningrum Pamungkas, 27 Maret 2017).

Wacana 'membela Islam' melalui politik keshalehan individu juga dimunculkan di dalam komunitas jama'ah tabligh di Yogyakarta, meskipun jama'ah ini di Indonesia acap kali sering dianggap sebagai kelompok Muslim yang jauh dari praktik politik

praktis.²² Akan tetapi pada saat mobilisasi dukungan Aksi Bela Islam, salah satu komunitas jama'ah tabligh di Yogyakarta, 'Teras Dakwah'²³ justru menjadi salah satu komunitas yang paling aktif mengkampanyekan agenda Aksi Bela Islam, khususnya untuk Aksi Bela Islam II dan III. Dalam kegiatannya, komunitas Teras Dakwah juga mewacanakan pentingnya 'keshalehan individu', bahkan bekerjasama dengan beberapa komunitas lainnya misalnya dengan komunitas 'Punk Muslim' misalnya dengan gerakan 'menghapus tatto' yang ditujukan pada kelompok-kelompok muda. Meskipun secara organisasi, komunitas Teras Dakwah tidak bergabung dengan parpol Islam manapun, tetapi dalam beberapa kegiatannya, komunitas ini seringkali bekerjasama dengan jaringan Forum Umat Islam, komunitas Tarbiyah dan PKS, termasuk ketika mendukung gerakan Aksi Bela Islam. Meskipun sangat aktif di dalam mengkampanyekan Aksi Bela Islam, dalam kegiatannya sehari-hari komunitas Teras Dakwah lebih banyak mengadakan pengajian yang terutama ditujukan bagi kaum muda. Tema tentang keshalehan individu adalah yang paling dominan mengisi kajian dan ceramah dakwah di dalam komunitas ini. Secara khusus komunitas ini menekankan dakwah pada tema mengenai 'pergaulan Islami' khususnya mensosialisasikan praktik 'hijab' bagi kelompok-kelompok muda di Yogyakarta.

²² Menurut ahli kajian Islam, Azyumardi Azra, keberadaan Jama'ah Tabligh di Indonesia lebih merupakan gerakan keshalehan yang bertumpu pada ajakan moralitas keshalehan individu dengan khususnya mengadakan aktivitas di mesjid-mesjid untuk melakukan ibadah ketimbang melakukan kegiatan melalui organisasi politik (Azra, Azyumardi. 2006. Indonesia, Islam and Democracy:

Dynamics in the Global Context. Jakarta: Solstice. Hal 190-192).

²³ Teras Dakwah adalah suatu komunitas dakwah jama'ah tabligh yang didirikan oleh Shakti 'Sheila on7' seorang musisi grup musik terkenal dari Yogyakarta yang memutuskan untuk keluar dari industri musik dan grup itu, kemudian mengganti namanya menjadi 'Shakti al Jugawy'.

E. Kesimpulan

Bergabungnya beberapa komunitas Muslim di dalam Aksi Bela Islam khususnya pada saat Aksi 212 menunjukkan keragaman ideologi keislaman beberapa komunitas dan organisasi-organisa Islam yang bergabung di dalamnya. Meskipun secara resmi organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah tidak memberikan pernyataan resmi yang mendukung aksi tersebut, tetapi beberapa dukungan juga ditunjukkan oleh beberapa komunitas di dalam NU maupun Muhammadiyah khususnya pada Aksi 212. Secara ideologis, wacana 'Aksi Bela Islam' sepertinya sulit untuk mendapatkan konsolidasi secara tetap dan kontinyu sebagai suatu alasan membangun gerakan sosial yang berdampak pada revolusi politik, sebagaimana dibahas dalam artikel ini tentang munculnya friksi di dalam tubuh GNPf-MUI sendiri. Meski demikian, wacana 'Membela Islam' sebagai bagian dari strategi dakwah melalui politik keshalehan (*politics of piety*) tetap berlanjut di dalam komunitas-komunitas yang bahkan beberapa anggotanya mendapatkan pengetahuan hanya di dalam komunitas saja, dengan kata lain memiliki akses terbatas pada internet dan juga media sosial.

Meski demikian, peranan media sosial di dalam memobilisasi dukungan untuk Aksi Bela Islam adalah realitas sosial yang tidak terelakkan. Greg Fealy (2017) dan Merlyna Lim (2017) menjelaskan bahwa dampak media sosial dan polarisasi politik identitas yang menguat khususnya pada saat Pilkada DKI Jakarta melalui mobilisasi Aksi Bela Islam telah memunculkan suatu potensi ancaman bagi tradisi demokrasi di Indonesia yakni kemunculan nasionalisme yang berbasis pada tribalisme (tribal

nationalism), dimana nasionalisme diterjemahkan secara 'sempit' menjadi nasionalisme yang didasari oleh pemusatan identitas etnis dan keagamaan khususnya oleh kelompok mayoritas yang mengabaikan aspek-aspek keragaman dan multikulturalisme di dalam entitas sosial masyarakat di Indonesia sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat luas di Indonesia, khususnya jika kita menilik bahwa 'keragaman' juga terdapat di kalangan kaum Muslim di Indonesia sendiri dan potensi politik identitas dengan menggunakan sentimen keagamaan menjadi sangat rapuh dan dapat menimbulkan kerentanan dan perpecahan bukan hanya di kalangan umat Muslim sendiri, melainkan juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Ambrust, Walter. 2000. *Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond*. Berkeley: University of California Press.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Indonesia, Islam and Democracy: Dynamics in the Global Context*. Jakarta: Solstice.
- Eickelman, Piscatori. 1996. *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Eickelman, Dale, dan Anderson, Jon. 2003. *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Hal. 1-20.
- Fealy, Greg. 2017. 'Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally'. Artikel online di laman Indonesia at Melbourne. Diakses di laman <http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/> Diakses pada 1 Januari 2017.

Lim, Merlyna. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia". *Critical Asian Studies*. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>. Diakses pada 28 Juni 2017.

Masud, Salvatore and van Bruinessen, 2009. *Islam and Modernity: Debate and Key Concept*. Edinburgh: Edinburg University Press.

Pamungkas, Arie Setyaningrum. 2016. "Membela Islam (?): Memahami Muslim Public Sphere di Indonesia". Artikel Online di Jurnal Remotivi dimuat pada laman <http://www.remotivi.or.id/amatan/340/Membela-Islam>. Diakses pada 8 Desember 2016.

Salvatore, Armando dan Levine, Mark. 2005. *Religion, Social Practice and Contested Hegemonies: Reconstructing Public Sphere in Muslim Majority Societies*. NY: Palgrave McMillan

Sumber Lain:

Rimanews di laman <http://rimanews.com/nasional/hukum/read/20161109/307850/MUI-Perkuat-Fatwa-Penistaan-Agama-Ahok/> Diakses pada 1 Desember 2016.

Detiknews online di laman <https://news.detik.com/berita/3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara> Diakses pada 9 Mei 2017.

Kompas Online di laman <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/02/14485661/sby.kalau.pendemo.diabaikan.sampai.lebaran.kuda.masih.ada.unjuk.rasa> Diakses pada 14 November 2016.

Tribunnews <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/16/sindir-ucapan-sby-soal-lebaran-kuda-ahok-apa-itutidak-menghina> Diakses pada 20 November 2016.

Obsessionnews di laman <http://obsessionnews.com/sikap-presidium-alumni-212-atas-pertemuan-gnppf-mui-dan-jokowi/> Diakses pada 30 Juni 2017.

Tempo online di laman <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/17/078892053/tujuh-alumni-aksi-212-mendeklarasikan-partai-syariah-visinya> Diakses pada 18 Juli 2017.

Belajar Islam di laman <https://belajarislam.com/> Diakses 5 Mei 2017.

Majalah Tempo. 2016. Tajuk Majalah 'Bukan Republik Mobokrasi'. Majalah Tempo Edisi 5-11 Desember 2016

Sumber Media Sosial:

Akun Facebook Buni Yani <https://www.facebook.com/buniyani/> Diakses pada 25 Oktober 2016 pk. 20:08 WIB

Akun Facebook Astaman Satri <https://www.facebook.com/profile.php?id=100010960713684>. Diakses 9 Juni 2017 09:01

Akun FSLDK-Indonesia <https://www.facebook.com/FSLDKIndonesia/>. Diakses 20 Januari 2017.

Akun Instagram Bela Quran Official Account GNPF-MUI | FB: Bela Quran - Twitter: @BelaQuran | #Spirit212Ramadhan | #SpiritBerjamaah | #BelaIslam | #BelaUlama [BelaQuran.com https://www.instagram.com/bela.quran/?hl=en](https://www.instagram.com/bela.quran/?hl=en). Diakses 10 Juni 2017pk. 23.12.

Akun Instagram Masjid Jogokariyan <https://www.instagram.com/masjidjogokariyan/>. Diakses 14 April 2017.

Hashtag #aksibelaislam3 dengan mengakses laman Instagram <https://www.instagram.com/>. Diakses 2 Juni 2017, pk. 21:04

Hashtag #AksiBelaIslam3 dan hashtag #Ciamis dengan mengakses Instagram <https://instagram.com/>, Diakses pada 29 November 2016 pk. 01.05

WhatsApp +6281282591XXX 29 November 2016

WhatsApp +6281282591XXX 30 November 2016

WhatsApp +6281282591XXX12 April 2017

WhatsApp +6281282591XXX 27 Maret 2017